

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

BAPPEDA merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Walikota dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian dan pelaksanaannya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bentuk berdasarkan kebutuhan, perkembangan dan kemajuan di bidang pemerintahan serta kemajuan teknologi dewasa ini, dalam rangka membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan, khususnya di bidang Pemerintahan.

Sesuai UU No 32 Th 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan wewenang dan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk merencanakan dan menetapkan sepenuhnya kebijakan dan program Daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintah Daerah dituntut lebih mandiri, sehingga berbagai perintis pembangunan daerah kearah tujuan dan kesuksesan akan menjadi agenda penting yang harus disiapkan pemerintah oleh Pemerintah Daerah. Untuk mencapai tujuan dan kesuksesan tersebut maka diperlukan perencanaan untuk menetapkan tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (Tarigan, 2004).

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Mekanisme perencanaan pemabngunan

diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah menjadikan program pembangunan tepat dengan arah yang dituju.

Oleh sebab itu BAPPEDA sebagai lembaga pelaksanaan tugas pokok dan berfungsi sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Th 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bertanggung jawab dalam penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan potensi sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata tidak mudah. Terdapat banyak masalah antara lain terkait kurangnya konsistensi perencanaan dan materi hingga bermasalah dilapangan. Disamping itu ruang gerak pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengaturan pembangunan yang sesuai potensi dan prioritas daerahnya sebenarnya terbatas (Bastian, 2006).

Selain permasalahan diatas, setiap daerah pasti memiliki permasalahan yang spesifik yang seringkali berbeda antar daerah. Perbedaan inipun berakibat pada perbedaan rencana pembangunan yang akan dilakukan didaerah yang bersangkutan. Oleh karna itu, perencanaan pembangunan daerah seharusnya bergantung pada permasalahan yang muncul di daerah tersebut.

Namun, pada kenyataannya permasalahan suatu daerah sering kali tidak tercermin dalam struktur perencanaan pemerintah (Bastian, 2006).

Mekanisme Perencanaan Pembangunan serta penentuan prioritas sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, hingga tingkat Provinsi, termasuk menyelenggarakan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Provinsi, Kabupaten dan Kota (Forum SKPD). Semua masukan yang diperoleh dari Musrenbang secara berjenjang ini diperlukan karena akan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pendanaan atau anggaran kegiatan daerah.

Ciri-ciri pokok perencanaan umum mencakup serangkaian tindakan berurutan yang ditujukan kepada pemecahan persoalan-persoalan dimasa datang dan semua perencanaan mencakup suatu proses yang berurutan yang dapat diwujudkan sebagai konsep dalam sejumlah tahapan. Karena tindakannya berurutan, berarti ada tahapan yang dilalui dalam perencanaan.

Oleh karna itu perencanaan pembangunan sangat penting untuk membangun suatu daerah, sehingga membuat penulis tertarik untuk magangt di BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat sekaligus untuk mendapatkan pengalaman di berbagai bidang pada instansi ini melalui proses pembelajaran langsung dalam rangka memanfaatkan keprofesian dalam satu bidang tertentu.

Berdasarkan landasan diatas penulis tertarik untuk mengangkat masalah perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan pada BAPPEDA

Provinsi Sumatera Barat dengan judul “Mekanisme Perencanaan Program Pembangunan pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat” dengan harapan dapat menguasai mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka permasalahan dalam tugas akhir ini adalah :

“Bagaimana Mekanisme Perencanaan Program Pembangunan Kota Padang pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat”

1.3 Tujuan Magang

Tujuan dari kegiatan magang ini yaitu :

Mengkaji bagaimana mekanisme perencanaan program pembangunan pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Kegiatan Magang

Dengan adanya pembahasan ini, maka manfaat yang dapat diambil dari kegiatan magang ini adalah :

1. Dapat melihat gambaran nyata didunia kerja dan dapat bersosialisasi dengan orang-orang baru didunia kerja tersebut.
2. Dapat belajar dari orang-orang (karyawan) yang sudah berpengalaman.
3. Untuk memperkaya dan menambah wawasan penulis dan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah, pemahaman dan pengalaman

selama didunia kerja, serta mengimpletasikan teori yang penulis dapat di dunia kerja.

4. Menambah kesadaran penulis untuk memasuki dunia kerja sangat dibutuhkan profesionalitas dan keterampilan agar tidak tersisih dari persaingan.
5. Memotivasi untuk bisa menjadi seorang yang bisa diandalkan dalam dunia kerja.
6. Untuk menambah litelature perpustakaan
7. Guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Diploma Ekonomi pada fakultas Ekonomi.

1.5 Waktu Pelaksanaan Magang

Kegiatan magang dilaksanakan pada Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang, Sumatera Barat. Mulai tgl 5 Juni s/d 3 Agustus 2017.

1.6 Data yang dibutuhkan

Beberapa data yang dibutuhkan seperti bagaimana struktur Organisasi Perangkat Daerah pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Bagaimana proses perencanaan pembangunan pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

1.7 Cara Memperoleh Data

Beberapa data tersebut didapatkan dengan cara seperti mendatangi ruang kantor bagian Perencanaan Makro Provinsi Sumatera Barat, melakukan wawancara, serta melaksanakan magang pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang penulis dalam pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, bab ini berisi teori tinjauan umum mengenai sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan implementasinya pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Bab III Gambaran umum instansi pemerintah, bab ini menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan profil instansi pemerintahan, sejarah berdirinya instansi pemerintah, visi dan misi instansi pemerintah, struktur organisasi serta bentuk kegiatan atau aktivitas instansi pemerintah yang bersangkutan

Bab IV Analisa dan hasil penelitian, Bab ini penulis akan menguraikan tentang sistem dan implementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis.